

# Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul SK BAN-PT NO. 1853/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

## Negosiasi Investasi Smelter Indonesia-Tiongkok untuk Mendukung Kebijakan Hilirisasi Bauksit Indonesia (2019-2023)

Skripsi

Oleh Shania Swarnadwipa 6092001026

Bandung

2024



# Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul SK BAN-PT NO. 1853/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

### Negosiasi Investasi Smelter Indonesia-Tiongkok untuk Mendukung Kebijakan Hilirisasi Bauksit Indonesia (2019-2023)

Skripsi

Oleh Shania Swarnadwipa 6092001026

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2024

# Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



#### Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Shania Swarnadwipa

Nomor Pokok : 6092001026

Judul : Negosiasi Investasi Smelter Indonesia-Tiongkok untuk Mendukung

Kebijakan Hilirisasi Bauksit Indonesia (2019-2023)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada Senin, 22 Januari 2024 Dan dinyatakan **LULUS** 

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA.

**Sekretaris** 

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Anggota

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Mengesahkan,

Qu'Ce dans

Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Shania Swarnadwipa

NPM : 6092001026

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Negosiasi Investasi Smelter Indonesia-Tiongkok untuk

Mendukung Kebijakan Hilirisasi Bauksit Indonesia (2019-2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Desember 2023

Shania Swarnadwipa

#### **ABSTRAK**

Nama: Shania Swarnadwipa

NPM : 6092001026

Judul : Negosiasi Investasi Smelter Indonesia-Tiongkok untuk Mendukung

Kebijakan Hilirisasi Bauksit Indonesia 2019-2023

Penelitian ini mengkaji proses negosiasi antara Indonesia dan Tiongkok (sebagai negara importir bauksit dan sumber investor asing bagi Indonesia) terkait investasi smelter, sebagai bahan integral dari implementasi kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia. Latar belakang penelitian ini mencakup tantangan finansial yang dihadapi Indonesia dalam membangun smelter bauksit serta kesulitan mencari investor asing di tengah kondisi global yang tidak pasti, terutama selam pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana negosiasi Indonesia-Tiongkok terkait investasi smelter bauksit guna mendukung kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia pada 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data sekunder, dan dikaji dengan kerangka pemikiran yang menggunakan diplomasi ekonomi, paradigma eklektik, dan kebijakan luar negeri berbasis ketahanan energi. Peneliti menemukan bahwa kombinasi pendekatan diplomasi ekonomi, position-based negotiation, dan paradigma eklektik memainkan peran penting pada keberhasilan negosiasi Indonesia dalam menarik investor perusahaan Tiongkok untuk membangun smelter bauksit di Indonesia. Indonesia dapat mempercepat pembangunan smelter bauksit dengan bantuan dari investasi asing dari Tiongkok, sementara Tiongkok memperoleh keuntungan dari akses sumber daya alam, lokasi geografis yang strategis, dan keuntungan internalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Dengan demikian, penelitian inii memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika negosiasi ekonomi internasional dan pentingnya paradigma eklektik dalam negosiasi mencari investor asing.

Kata Kunci : Hilirisasi Bauksit Indonesia, Investasi Smelter, Diplomasi

Ekonomi, Tiongkok, Kebijakan Luar Negeri

#### **ABSTRACT**

Name : Shania Swarnadwipa

Student ID : 6092001026

Title : Negotiations for Indonesia-China Smelter Investment to Support

Bauxite Value-Adding Policy in Indonesia 2019-2023

This study examines the negotiation process between Indonesia and China (as an importer of bauxite and a foreign investor for Indonesia) regarding investment in smelters, as an integral part of Indonesia's bauxite value-adding policy implementation. The background of this research includes the financial challenges faced by Indonesia in building bauxite smelters and the difficulty in attracting foreign investors amidst uncertain global conditions, particularly during the COVID-19 pandemic and policy changes. From this background, the research question posed is how the Indonesia-China negotiations regarding bauxite smelter investment support Indonesia's bauxite value-adding policy from 2019-2023. The research method used is qualitative with secondary data collection, examined within the framework of economic diplomacy, eclectic paradigm, and energy-based foreign policy. The study finds that a combination of economic diplomacy, positionbased negotiation, and eclectic paradigm plays a crucial role in Indonesia's success in attracting investment from Chinese companies to build bauxite smelters in Indonesia. Indonesia can accelerate its bauxite smelters development with assistance from Chinese foreign investment, while China benefits from access to natural resources, strategic geographical locations, and internalization advantages that can enhance production efficiency. Thus, this research provides an in-depth understanding of the dynamics of international economic negotiations and the importance of the eclectic paradigm in negotiating foreign investment.

**Keywords**: Indonesia Bauxite Adding-value, Smelter Investment, Economic Diplomacy, China, Foreign Policy

**KATA PENGANTAR** 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

atas curahan rahmat dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul "Negosiasi Investasi Smelter Indonesia-Tiongkok untuk

Kebijakan Hilirisasi Bauksit Indonesia 2019-2024" ini tepat pada waktunya. Skripsi

ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan

Internasional pada program Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh

bantuan, baik pengajaran, bimbingan, maupun arahan. Untuk itu penulis

menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Adelbertus Irawan

Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku pembimbing penulis yang telah menuntun

dengan sabar hingga penelitian ini selesai.

Akhir kata penulis menyadari keterbatasannya dan ketidaksempurnaan

penelitian dalam penyusunan skripsi. Penulis meminta maaf apabila terdapat

kekurangan dalam penelitian ini. Penulis terbuka atas saran dan masukan dari

pihak-pihak lain yang dapat membantu mengembangkan penelitian ini. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk

pengembangan ke arah yang lebih baik.

Bandung, 14 Desember 2023,

Penyusun,

Shania Swarnadwipa

iii

#### **DAFTAR ISI**

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR AKRONIM	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kajian Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Kerangka Pemikiran	12
Kebijakan Luar Negeri	12
Diplomasi Ekonomi	15
Paradigma Eklektik	19
Konsep Ketahanan/Keamanan Energi (Energy Security)	20
1.7. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: INDUSTRI BAUKSIT INDONESIA DAN HILIRISASI 2023	26
2.1. Sumber Daya dan Cadangan Bauksit di Indonesia	27
2.2. Perusahaan Bauksit Lokal	29
2.3. Kebijakan Indonesia berdasarkan Amanat UUD 1945 terkait	
Pengelolaan Mineral dan Kebijakan Hilirisasi	
2.3.1. UU Minerba No. 3 Tahun 2020	32
2.3.2. Permen ESDM No. 1 Tahun 2014	33
2.3.3. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019	33
2.4. Perkembangan Ekspor Bauksit Indonesia	34
2.5. Faktor Penyebab Indonesia Menghentikan Ekspor Bauksit pada	
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024)	38

	2.5.1. Dorongan Kebijakan Hilirisasi oleh Pemerintah	. 38
	2.5.2. Potensi Peningkatan Nilai Tambah Bauksit	40
	2.5.3. Peningkatan Tenaga Kerja	42
	2.5.4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	43
	2.5.5. Sebagai Komponen untuk Memproduksi Baterai Mobil Listrik (EV)	43
	2.6. Negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Bauksit Lokal	. 44
	2.7. Dampak Kebijakan Hilirisasi Bauksit terhadap Perusahaan Tamba Bauksit Lokal	
	2.8. Tantangan dan Target Melaksanakan Hilirisasi Bauksit	
	AB III: ARTI PENTING BAUKSIT BAGI TIONGKOK	
	3.1. Dinamika Hubungan Ekonomi Tiongkok-Indonesia	61
	3.2. Kerja sama Energi, Mineral, dan Batubara (Minerba) Tiongkok-	
	Indonesia	64
	3.3. Ketergantungan Tiongkok pada Sumber Daya Bauksit	68
	3.4. Keuntungan Tiongkok dalam Mengimpor Bauksit Indonesia	. 72
	3.5. Tujuan dan Motivasi Tiongkok Berinvestasi Smelter Bauksit Indone	
	2.5.1. Dowleyrongnya Dogoleon Aluminium Domostile	
	3.5.1. Berkurangnya Pasokan Aluminium Domestik      3.5.2. Pembangunan Industri Otomotif	
	3.5.3. Upaya Tiongkok Menuju Dekarbonasi dan Transisi Menuju Energi	. 70
	Terbarukan	. 79
	3.5.4. Green Recovery dan Upaya Green Aluminium	. 81
B	AB IV: NEGOSIASI INDONESIA-TIONGKOK UNTUK INVESTASI	
SI	MELTER PENGOLAHAN BAUKSIT (2019-2024)	. 82
	4.1. Faktor yang Mempengaruhi Proses Negosiasi Indonesia dan Tiongk	
	4.1.1. Positive sum (Win-win solution)	
	4.1.2. Perencanaan hubungan jangka panjang ( <i>long-term relationship</i> )	
	4.1.3. Keseimbangan dalam konsekuensi ( <i>Equal harm and equal gain</i> )	
	4.1.4 Paradigma Eklektik: <i>Ownership</i> , Lokasi, dan Internalisasi	
	4.2. Pembicaraan Indonesia-Tiongkok terkait Kebijakan Hilirisasi melal	
	Forum Internasional	07

4.3. Respon Tiongkok terhadap Kebijakan Hilirisasi	Bauksit Indonesia 91
4.4. Negosiasi Indonesia-Tiongkok terkait Investasi Sa Bauksit	O
4.5. Proses Negosiasi Perusahaan Lokal Indonesia, Pedan Tiongkok terkait Pelaksanaan Pembangunan Sm Bauksit di Indonesia	elter Pengolahan
4.6. Kesepakatan dan Kerja sama Investasi Tiongkok terkait Pembangunan Smelter Aluminium di Indones Tiongkok	ia oleh Perusahaan
BAB V: KESIMPULAN	113
Kesimpulan	113
DAFTAR PUSTAKA	xii

#### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.6.1: Kerangka Pemikiran Kebijakan Hilirisasi Bauksit	yang
Dipengaruhi oleh Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Bei	basis
Keamanan Energi	23
Grafik 2.4.1: Perkembangan Ekspor Bauksit Indonesia dari 2010-2022	35
Grafik 3.3.1 Ketergantungan Tiongkok terhadap Impor Bauksit Periodo	
2002-2022	70
Grafik 3.3.2 Negara Pengekspor Bauksit ke Tiongkok	72

#### DAFTAR TABEL

Tabel 2.4.1: Nilai Ekspor Bauksit Indonesia dari 2010-2022	35
Tabel 2.4.2: Negara Pengekspor Bauksit di Dunia	37
Tabel 2.5.1: Ekspor Bauksit dan Impor Aluminium Indonesia yang Kian	
Tumbuh	41
Tabel 2.6.2.1: Hilirisasi Mendukung Prospek Permintaan Produk EBT	51
Tabel 3.1: Negara Pengimpor Bauksit di Dunia	68

#### **DAFTAR AKRONIM**

ADRO Adaro Energy Indonesia

ANTM Aneka Tambang

APB3I Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

BAI Borneo Alumina Indonesia

BBM Bahan Bakar Minyak

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

BRI Belt and Road Initiative

BUMN Badan Usaha Milik Negara

CCTDA China Coal Transportation and Distribution

CGA Chemical Grade Alumina

CHALIECO China Aluminium International Engineering Corporation

Limited

CITA Cita Mineral Investindo

CNIA China Nonferrous Metals Industry Association

DSB Dispute Settlement Body / Badan Penyelesaian Sengketa

EBT Energi Baru dan Terbarukan

EPC Engineering, Procurement and Construction

ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral

EV Electric Vehicle / Mobil listrik

FDI Foreign Direct Investment / Investasi asing

GW Giga Watt

Hipmi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

IKN Ibu Kota Negara

IMF International Monetary Fund

IMI Indika Mineral Investindo

IMIP Morowali Industrial Park

INDY Indika Energy

IUP Izin Usaha Pertambangan

IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus

KEK Kawasan Ekonomi Khusus

KTT Konferensi Tingkat Tinggi

LDC List Developed Countries

MII Marketing Investasi Indonesia

Mineral dan batubara

MoU Memorandum of Understanding

NDRC National Development and Reform Commission

NEV Neighborhood Electric Vehicle / kendaraan energi baru

NZE Net Zero Emission

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum

PDB Produk Domestik Bruto

Pemilu Pemilihan Umum

Permen Peraturan Menteri

PHK Pemutusan Hubungan Kerja

PIM Perkasa Investama Mineral

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

PP Pembangunan Persero

PV Photovoltaic

RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Belanja

RRT Republik Rakyat Tiongkok

SDA Sumber Daya Alam

SGA Smelter Grade Alumina

SPBE Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

TCTP Two Countries Twin Parks

TIIMM Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting

UU Undang-undang

UMKM Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

WTO World Trade Organization

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan bahan mineral terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini sejalan dengan berkembangnya populasi manusia dan perubahan pola hidup manusia yang berorientasi pada kemajuan teknologi. Akibatnya, permintaan pasokan bahan mineral semakin meningkat antar negara di dunia. Pada kenyataannya, suatu negara yang memiliki potensi sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti mineral, cenderung menimbulkan kerawanan konflik daripada menikmati kesejahteraan dari sumber daya tersebut. Bahwasanya, dalam sistem politik internasional setiap negara berpacu pada kelangkaan dan keterbatasan sumber daya mineral. Mengingat bahwa minerba merupakan sumber daya yang tak terbarukan, maka negara perlu mengupayakan pengelolaan yang dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, serta berkeadilan agar dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Terlebih lagi, setiap negara memiliki potensi minerba yang berbeda-beda, membuat isu penanganan sumber daya mineral ini semakin penting sebab negara harus mampu mengelola alokasi sumber daya mineral tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun permintaan minerba dari luar negeri.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir seluruh pulaunya terdapat gunung berapi sehingga memiliki potensi sumber daya mineral, di antaranya seperti bauksit. Diketahui bahwa Indonesia berada pada posisi negara keenam terbesar di dunia yang memiliki kandungan bauksit. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia selama ini juga bermain penting dalam penyediaan bauksit di dunia internasional. Tambang bauksit ditemukan pertama kali di daerah Kinjang, Pulau Bintan, Riau pada tahun 1924. Sejak tahun 1935, bauksit ditambang untuk keperluan ekspor dalam bentuk bijih mentah.<sup>1</sup>

Seiring meningkatnya permintaan aluminium di seluruh dunia, terutama karena digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan sebagainya, bauksit mentah menjadi bahan baku yang sangat penting dalam produksi aluminium. Indonesia yang menjadi salah satu pemasok utama bauksit mentah di pasar internasional membuat beberapa negara, terutama Tiongkok, menjadi sangat bergantung pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi aluminium mereka. Sementara Indonesia telah mengambil langkah proteksionis untuk menghentikan ekspor bauksit mentah di tahun 2023 sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai cara Indonesia bernegosiasi dan melobi Tiongkok untuk berinvestasi smelter untuk mewujudkan kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Idris, "Mengenal Logam Bauksit yang Mau Dilarang Jokowi Diekspor Mentah," Kompas, 23 Desember 2022, https://money.kompas.com/read/2022/12/23/154349326/mengenal-logam-bauksit-yang-mau-dilarang-jokowi-diekspor-mentah?page=all.

#### 1.2. Identifikasi Masalah

#### 1.2.1. Deskripsi Masalah

Sistem politik internasional yang mengelola sumber daya alam seringkali dapat menimbulkan potensi konflik karena persaingan antarnegara untuk mengatasi kelangkaan dan keterbatasan sumber daya alam. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia menjadi penting karena potensi Indonesia yang besar sebagai penyedia sumber daya mineral. Pemerintah Indonesia semakin berupaya untuk membuat aturan dan regulasi, termasuk dalam hal ekspor dan keterlibatan asing. Langkah-langkah ini tercermin dalam revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yang melarang ekspor mineral mentah paling lama lima tahun.<sup>2</sup> Ditambah belakangan ini pada tahun 2023, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi ingin memberhentikan ekspor bauksit mentah ke luar negeri demi menjalankan hilirisasi bauksit Indonesia, meskipun hal ini dapat mempengaruhi negara-negara mitra, seperti Tiongkok, yang bergantung pada impor bauksit Indonesia.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya kebijakan hilirisasi bauksit, Indonesia kerap kali dihadapi dengan hambatan finansial dalam menyiapkan pembangunan smelter pengolahan bauksit. Pembangunan smelter bauksit membutuhkan investasi yang besar, dengan biaya yang berkisar US\$1,2 miliar untuk kapasitas 2 juta ton. Dalam mencari investor asing, Indonesia menilai Tiongkok mampu mewujudkan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Larangan Ekspor Mineral Ancam Industri Pertambansan Hulu-Hilir," Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 15 November 2013, https://kemenperin.go.id/artikel/7855/Larangan-Ekspor-Mineral-Ancam-IndustriPertambansan-Hulu-Hilir.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Verda Nano Setiawan, "Menteri ESDM Ungkap Alasan Jokowi Setop Ekspor Bauksit," CNBC Indonesia, 03 Januari 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103115926-4-402373/menteri-esdm-ungkap-alasan-jokowi-setop-ekspor-

bauksit#:~:text=Pada%20dasarnya%2C%20larangan%20ekspor%20bijih,(smelter)%20di%20dala m%20negeri.

kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia karena memiliki teknologi smelter yang berkualitas dan lebih murah dibandingkan dengan negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat. Sementara sumber pendanaan dari investor asing terbesar bagi Indonesia, seperti Tiongkok, juga sulit diperoleh karena berbagai kondisi global dan ketidakpastian ekonomi, terutama di tengah pandemi COVID-19, perubahan kebijakan, dan proses panjang dalam mendapatkan persetujuan investasi. Kesulitan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia mendorong pembangunan smelter bauksit, kenyataannya mandeknya investasi ini menghambat pencapaian tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dampak dan negosiasi untuk menarik investor, khususnya investasi asing seperti dari Tiongkok, guna mendukung kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia.

#### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus menganalisa pembuatan kebijakan luar negeri Tiongkok menanggapi kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia, secara spesifik dalam waktu tahun 2019 hingga 2023. Periode tahun 2019 menunjukkan tahun Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya kebijakan mineral hilirisasi, hingga pada tahun 2023 Indonesia melarang ekspor bahan mentah bauksit.

Penelitian ini akan dibatasi menggunakan dua variabel, yaitu:

Variabel Independen : Tiongkok sebagai importir bauksit terbesar

bagi Indonesia

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Firda Dwi Muliawati, "Jangan Heran! Soal Bauksit RI, Ujung-ujungnya China Lagi," CNBC Indonesia, 28 Desember 2022, https://www.cnbcindonesia.com/news/20221228142839-4-400888/jangan-heran-soal-bauksit-ri-ujung-ujungnya-china-lagi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Firda Dwi Muliawati, "Smelter Bauksit Mandek, Ini Usulan Pengusaha Biar Hilirisasi Jalan," CNBC Indonesia, 23 Januari 2024.

Dengan indikator sebagai berikut :

 Tiongkok menempati posisi pertama importir bauksit terbesar bagi Indonesia, sebesar 90% bauksit Indonesia diekspor ke Tiongkok pada tahun 2022.<sup>6</sup>

2. Bauksit digunakan untuk keperluan otomotif dan kebutuhan industri.

Variabel Dependen : Indonesia melakukan hilirisasi bauksit

dengan menghentikan ekspor bauksit ke

dunia internasional, termasuk Tiongkok.

Dengan indikator sebagai berikut

 Indonesia menempati posisi ke enam produsen bauksit terbesar di dunia dengan volume produksi 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan bauksit dunia setelah Guinea mencapai 24%, Australia 20%, Vietnam 12%, Brazil 9%, dan Jamaika 7%.<sup>7</sup>

Penulis berharap bahwa adanya pembatasan permasalahan ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

#### 1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera dalam penjelasan sebelumnya, lantas peneliti berusaha untuk menelaah "Bagaimana negosiasi Indonesia-Tiongkok terkait investasi smelter guna mendukung <del>dalam</del> kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia pada 2019-2023?"

<sup>6</sup> Ridhwan Mustajab, "Ekspor Bauksit Indonesia Capai US\$623 Juta pada 2022," Data Indonesia, 9 Juni 2023, https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/ekspor-bauksit-indonesia-capai-us623-juta-

pada-2022.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anisatul Umah, "Punya Harta Karun Bauksit, RI Impor Aluminium 748.000 Ton," CNBC Indonesia, 21 Oktober 2021, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211001121330-4-280670/punya-harta-karun-bauksit-ri-impor-aluminium-748000-ton.

#### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa negosiasi Indonesia dengan Tiongkok sebagai negara importir bauksit Indonesia terkait investasi smelter dalam kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia yang akan dianalisa dengan teori diplomasi ekonomi, paradigma eklektik, dan kebijakan luar negeri berbasis ketahanan energi.

#### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penting, terutama bagi peneliti sendiri. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai hubungan antara Tiongkok dan Indonesia dan cara Indonesia melobi Tiongkok untuk investasi smelter sebagai upaya melaksanakan kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia yang dianalisis dengan konsep kebijakan luar berbasis ketahanan energi, diplomasi ekonomi, dan paradigma eklektik sebagai bentuk implementasi nyata dari sebuah teori. Diharapkan para pembaca mendapatkan pengetahuan lebih mengenai respon negara luar dalam menanggapi kebijakan hilirisasi Indonesia, bagaimana negara luar dan negara Indonesia bernegosiasi hingga mencapai persetujuan antar kedua negara tersebut, dan kepentingan nasional lainnya sebagai faktor-faktor internal yang dapat mendorong kebijakan hilirisasi, dan faktor-faktor eksternal yang dapat mendorong suatu negara importir melakukan diplomasi dengan negara eksportir. Pengetahuan ini diharapkan nantinya dapat menjadi suatu bahan diskusi lanjut atau bahan perdebatan di lingkungan kampus bagi akademisi Hubungan Internasional, khususnya di tingkat mahasiswa.

#### 1.4. Kajian Pustaka

Jurnal pertama berjudul "Kebijakan Indonesia dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Larangan Ekspor Mineral Mentah Nikel ke Tiongkok)" merupakan karya Gusti Satriawan. Penelitian ini membahas 4 bagian utama, diantaranya adalah: 1) Pertambangan Nikel di Indonesia; 2) Hubungan Indonesia dan Tiongkok Bidang Pertambangan dan Energi; 3) Kebutuhan Tiongkok akan Nikel Indonesia; dan 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Mengenai Minerba. Analisa tersebut menggunakan perspektif sudut pandang Merkantilisme, teori kebijakan luar negeri, dan konsep kepentingan nasional. Indonesia merupakan negara produsen terbesar kelima di dunia dan merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar ketiga di dunia. Sementara Tiongkok merupakan negara partner terbesar Indonesia dalam bidang pertambangan dan energi karena membutuhkan hasil tambang dalam kategori besar untuk proyek besar Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine Pertamina. Sementara itu, untuk dapat mencapai pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, Indonesia menyusun Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mengenai Minerba yang membicarakan jenis pelanggaran dan sanksi apabila terdapat kejahatan/pelanggaran dalam praktik pengusahaan pertambangan. Hasil penelitian vang dilakukan penulis mengungkapkan bahwa pertambangan di Indonesia merupakan salah satu industri yang menjanjikan di Indonesia karena potensi alam yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan cadangan mineral dan juga bahan tambang lainnya yang sangat memikat permintaan dunia internasional. Banyak pro dan kontra yang

menyayangkan kebijakan ini, termasuk Tiongkok sebagai negara pengimpor nikel terbesar dari Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, Tiongkok harus mencari negara pengekspor lainnya sebagai pengganti Indonesia. Selain itu, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia ke dunia juga berdampak pada harga nikel di dunia karena posisi Indonesia yang selama ini bermain dominan dalam pasokan mineral nikel di dunia.<sup>8</sup>

Jurnal kedua berjudul "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara" merupakan karya Syahrir Ika. Penelitian ini membahas 4 pembahasan utama, yakni: (1) Urgensi Kebijakan Hilirisasi Mineral; (2) Implementasi Kebijakan Hilirisasi Mineral; dan (3) Tantangan Pemerintah. Untuk mengkaji poin-poin tersebut, penelitian ini berbentuk penelitian kebijakan, menggunakan teori *economic viability* yang bergantung pada faktor 3P (proximity and access to raw material; product marketability; dan power needed to operate), serta menggunakan teori hilirisasi. Indonesia yang memiliki cadangan mineral yang cukup besar berpotensi menarik investasi global apabila produk tersebut dihasilkan dari smelter dan bukan menjual berupa bentuk bijih atau mineral mentah. Dalam implementasi kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia, pembangunan smelter masih belum banyak berkembang dengan baik, dan disebutkan juga bahwa proyek smelter membutuhkan investasi yang tinggi.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gusti Satriawan, "Kebijakan Indonesia dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah Tahun 2009-2014, Studi Kasus: Larangan Ekspor Mineral Mentah Nikel ke Tiongkok," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2, No. 2 (2015): 1-14, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5201/5080.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Syahrir Ika, "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara," *Kajian Ekonomi Keuangan* 1, no. 7 (2017), https://doi.org/10.31685/kek.v1i1.259.

Terlepas rencana awal pemerintah terkait kebijakan hilirisasi, pemerintah masih mengalami beberapa rintangan dalam kebijakan tersebut. Persoalannya nampak ketika basis produksi (pasokan) di hulu tidak diperkuat, membuat smelter-smelter domestik kesulitan mendapatkan bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dan kapasitas smelter di beberapa perusahaan Indonesia masih rendah sehingga tidak mampu menyerap produksi mineral yang dihasilkan oleh ratusan perusahaan tambang. Berdasarkan hasil penelitiannya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi dan nilai-nilai strategis dari kebijakan hilirisasi yang diatur dalam UU No. 4 tahun 2009, yakni untuk mendorong pendirian smelter di dalam negeri; mengintegrasikan operasi hulu-hilir industri; meningkatkan nilai tambah dan peningkatan negara; serta untuk menegakkan kedaulatan mineral.

Jurnal ketiga berjudul "Politik Hilirisasi Kelapa Sawit di Indonesia" yang ditulis oleh Gris Sintya Berlian. Untuk memahami hilirisasi kelapa sawit dari sisi politik, maka tulisan ini terdiri atas dua pembahasan utama, yakni (1) Momentum hilirisasi kelapa sawit di Indonesia; (2) Tantangan domestik dengan menganalisis peran pemerintah; dan (3) Ketidakmampuan pemerintah sebagai *entrepreneur*; dan (4) Ketidakmampuan pemerintah sebagai *manager of conflicts*. Penelitian ini melihat aspek pembangunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia berdasarkan peran kebijakan yang dibuat pemerintah dan bagaimana kebijakan dan institusi yang diciptakan dapat mempengaruhi pergerakan industri kelapa sawit. Penulis menggunakan perspektif ekonomi politik institusionalis yang melihat peran negara sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts* dalam memfasilitasi perubahan

struktural melalui hilirisasi untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia.<sup>10</sup>

Hilirisasi kelapa sawit Indonesia muncul pada tahun 2010. Hilirisasi merupakan upaya pemerintah untuk mengubah kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional sebagai pengekspor CPO menjadi ekonomi modern dengan menjadi pengekspor produk turunan CPO. Untuk melakukan hal tersebut, maka pemerintah turut berperan sebagai entrepreneur dan state as manager of conflicts. Akan tetapi, dalam hal peran pemerintah sebagai entrepreneur dalam hilirisasi kelapa sawit, terdapat beberapa ketidakmampuan yang nampak, seperti adanya ketidakjelasan visi industri kelapa sawit dan ketidaksinergisan antara pemerintah dengan pelaku industri kelapa sawit. Sementara dalam hal peran pemerintah sebagai conflict manager, pemerintah sepatutnya menjadi sumber solusi dalam mengatasi perbedaan pandangan di antara pihak yang terlibat dalam perubahan struktural. Selama hilirisasi kelapa sawit di Indonesia berlangsung, pemerintah tidak dapat mengatasi kerugian yang dialami petani akibat perilaku pengusaha industri hilir yang membeli buah kelapa sawit di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.<sup>11</sup>

#### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1 Metode Penelitian

Ditinjau dari identifikasi masalah, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang lebih

Gris Sintya Berlian, "Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia," Jurnal Ilmiah Transformasi Global
 No.
 (2015):
 80-100,

https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/33/45.

<sup>11</sup> Ibid.

berfokus pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi makna fenomena tersebut. Perhatian penelitian kualitatif tertuju pada elemen manusia, objek, institusi, dan interaksi atau hubungan antara elemen-elemen penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memahami peristiwa, perilaku, atau fenomena. Maka, pendekatan campuran ini dipilih karena penelitian kualitatif dinilai dapat mencari jawaban atas cara Indonesia berdiplomasi dengan Tiongkok terkait investasi smelter dalam kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia.

#### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif peneliti banyak dituntut mengumpulkan data berupa dokumen, jurnal, buku yang dapat diakses melalui internet maupun pustakawan. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan topik penelitian seputar perspektif Tiongkok terhadap kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia. Peneliti tidak menggunakan metode wawancara karena tidak memungkinkan untuk bertemu dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus yang diteliti. Peneliti berusaha melakukan penelitian yang cenderung kualitatif dengan memperdalam penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta berusaha memasuki objek penelitian. Untuk keabsahan data, peneliti memakai teknik triangulasi, yakni memeriksa kebenaran atau validitas data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan melakukan *check and recheck*.

Teknik analisa data dilaksanakan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder berupa jurnal, dokumen yang dikeluarkan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Anton Wibisono, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," Kemenkeu, diakses pada 19 Maret 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html.

oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok, serta berita website yang sudah diolah. Peneliti mencoba melakukan analisis dan interpretasi data dengan mengkonstruksikan antara data dan fakta, serta meneliti bagaimana status kelompok manusia, objek, kondisi, dan fakta. Dengan demikian peneliti dapat melakukan pelaporan hasil penelitian yang komprehensif mengenai proses Indonesia bernegosiasi dengan Tiongkok untuk berinvestasi smelter guna mewujudkan kebijakan hilirisasi bauksit Indonesia.

#### 1.6. Kerangka Pemikiran

#### Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan sikap dan langkah strategi pemerintah nasional untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara di luar dunia internasional dan di luar ranah eksternal. Hal ini termasuk ketika negara memilih untuk tidak bertindak apapun ketika menanggapi suatu isu di dunia internasional. Menurut Weber dan Smith, kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang mengupayakan untuk mencapai tujuan, nilai, pengambil keputusan, dan tindakan yang diambil negara di mana pemerintah sebagian besar berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam bertindak dengan pihak eksternal. Kebijakan luar negeri juga termasuk dalam aksi politik yang dapat memberikan pengaruh di luar lintas batas nasional. Mengara di mana pemerintah sebagian besar berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam bertindak dengan pihak eksternal.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Valerie M. Hudson, "The History and Evolution of Foreign Policy Analysis," dalam *Foreign Policy*, ed Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne (Oxford: Oxford University Press, 2016), 14.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mark Weber dan Michael Smith, "Foreign Policy In A Transformed World," ed.1 (Routledge Publisher, 2002), 13

Melalui kebijakan luar negeri, negara dapat mewujudkan berbagai kepentingan nasionalnya. Maka, kebijakan luar negeri suatu negara juga dapat berubah seiring dengan berubahnya kepentingan negara. Terlepas adanya berbagai macam kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang secara seragam dikejar oleh semua negara, yakni kemerdekaan politik dan integritas wilayah, kesejahteraan ekonomi dan prestise suatu negara. Kebijakan luar negeri dirumuskan untuk melindungi nilai dan kepentingan inti suatu negara yang meliputi perihal keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi. 15

Tujuan politik luar negeri secara umum dikategorikan menjadi tiga, seperti tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek merupakan bagian dari tujuan utama negara yang berkaitan dengan kepentingan inti, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik. Suatu negara tentunya harus berurusan dengan semua hal yang mengancam integritas geografisnya. Sementara untuk tujuan jangka menengah berkaitan erat dengan perdagangan, bantuan luar negeri, dan kemajuan ekonomi masyarakat seiring dengan peningkatan taraf hidup mereka. Maka dari itu, kebijakan luar negeri untuk tujuan jangka menengah bertujuan untuk mencapai kemakmuran ekonomi sehingga dapat memainkan peran yang lebih tegas dalam politik internasional. 16

Selain kepentingan ekonomi, ekspansi teritorial dan ideologis melalui penyebaran gagasan, ideologi, sistem, budaya, dan nilai juga termasuk dalam tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jesmine Ahmed, "The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relation- An Analysis," *Journal of Critical Review Assam University* 7, no. 2 (2019): 788, https://www.jcreview.com/admin/Uploads/Files/61a743b1835520.33416335.pdf. <sup>16</sup> *Ibid.* 788.

jangka menengah. Untuk tujuan jangka panjang, kebijakan luar negeri berkaitan erat dengan rencana, visi mengenai organisasi politik atau ideologi dari sistem internasional. Namun, tujuan-tujuan tersebut tidak pasti dan tidak jelas untuk diprediksi proses pengejarannya. Selain itu, hal-hal lainnya yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dari faktor internal adalah politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis, dan kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri adalah aksi dan reaksi dari negara lain dan adanya campur tangan dari organisasi internasional dan regional.

Dengan demikian, proses pembuatan kebijakan luar negeri sangatlah kompleks, di mana diperlukannya pertimbangan faktor internal dan eksternal. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara melibatkan serangkaian interaksi dengan negara lain terkait hal-hal politik, ekonomi, sosial, dan militer untuk mencapai suatu kepentingan. Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dari kebijakan luar negeri tersebut dapat berupa kerja sama yang bersifat bilateral, trilateral, regional dan multilateral yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perang, perdamaian, dan kerja sama ekonomi berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dijadikan bahan peritmbangan kebihakan luar negeri dalam merespon isu internasional.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, 788.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kurniawan, "Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Luar Negeri," (2017), http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32353/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllo wed=v.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*.

#### Diplomasi Ekonomi

Diplomasi menurut Headley Bull merupakan praktik hubungan antara negara-negara dengan entitas lain yang terlibat dalam politik dunia melalui kebijakan resmi dan sarana damai. Tugas utama diplomat yang terlibat dalam negosiasi adalah untuk menyelesaikan konflik atau menawarkan cara menyelesaikan konflik bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>20</sup> Negosiasi adalah bentuk dari sebuah proses pengambil keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau kebutuhan mereka. Negosiasi seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan dan keinginan dan mencari solusi bersama.<sup>21</sup>

Terdapat dua jenis negosiasi yang penting untuk dipahami, yakni position-based negotiation dan interest-based negotiation. Dalam position based negotiation, pihak lain sering dianggap sebagai lawan yang harus dikalahkan, karena setiap pihak cenderung bersikap egois untuk meraih kemenangan atas yang lain. Sementara dalam interest-based negotiation, menekankan pentingnya hubungan, terutama apabila kedua belah pihak saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan negosiasi ini meningkatkan kemungkinan untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak lain dan mencapai keputusan atau hasil yang saling menguntungkan.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Elvin Abdurahmanli, "Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used between States," Anadolu Akademi, diakses pada 24 Januari 2024, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2000617.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Roy J. Lewicki, Bruce Barry, dan David M. Saunders, "The Nature of Negotiation," dalam *Essentials of Negotiation*, (New York: Mc Graw Hill, 2016), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Neil Katz dan Kevin McNulty, "Interest-Based Negotiation," Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, diakses pada 24 Januari 2024, https://www.maxwell.syr.edu/docs/default-source/ektron-files/interested-based-negotiation-nk.pdf?sfvrsn=2cd0bff1\_5, hlm. 1.

Diplomasi ekonomi melibatkan peran sumber daya ekonomi dan kerja sama antar negara untuk mencapai keuntungan mutual. Hubungan antar negara akan semakin baik apabila keterampilan diplomasi dipadukan dengan alat ekonomi untuk mencapai tujuan politik, keonomi, dan strategis ngara. Aksi ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan ekspor-impor, meningkatkan kepentingan ekonomi nasional, memberikan informasi kepada calon investor asing mengenai peluang investasi, menegosiasikan kerja sama ekonomi dan perdagangan untuk menghilangkan perbedaan yang bermasalah dan menyelaraskan standar di berbagai sektor ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Diplomasi ekonomi mencakup beberapa tingkat. Pertama, diplomasi ekonomi tingkat bilateral yang dilaksanakan melalui perjanjian perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, perpajakan dan berbagai peraturan ekonomi formal dan informal antara kedua negara. Kedua, diplomasi ekonomi di tingkat regional berkaitan dengan perjanjian antara lebih dari dua negara di suatu wilayah yang didasarkan pada wilayah geografis dan homogenitas. Dalam tingkat regional, kegiatan ekonomi seperti pada penghapusan hambatan dan pembukaan pasar lebih mudah dilaksanakan oleh karena adanya konektivitas dan homogenitas dalam wilayah tersebut untuk meningkatkan kepentingan ekonomi nasional dan mendorong liberalisasi ekonomi yang mendorong pentingnya kerja sama regional dalam diplomasi ekonomi. Ketiga, diplomasi ekonomi tingkat multilateral beroperasi dengan rezim perdagangan seperti Organisasi Perdagangan Dunia

Rajendra Shrestha, "Economic Diplomacy for Development Partnership," *Journal of Foreign Affairs* 1, No. 1 (2021), https://www.nepjol.info/index.php/jofa/article/download/36249/28301/104957, 60.

(WTO). Sejak tahun 1995, perdagangan antar negara mulai diatur oleh peraturan internasional. Organisasi ekonomi dan keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan berbagai badan PBB, turut mempromosikan diplomasi ekonomi multilateral.<sup>24</sup>

Diplomasi ekonomi pada umumnya lebih banyak melibatkan peran aparat pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang ekonomi. Para menteri, kepala pemerintahan, parlemen, badan-badan publik independen dan badan-badan daerah juga turut memberikan pengaruh mereka. Tidak hanya aktor negara saja, sejumlah aktor non-negara juga berperan dalam diplomasi ekonomi dengan membentuk kebijakan pemerintah dan sebagai pemain independen. Peran organisasi non-pemerintah atau LSM, yang dikelompokkan sebagai masyarakat sipil, juga aktif melakukan upaya publisitas untuk memberikan pengaruh atau tekanan pada pemerintah. Sementara itu, peran organisasi internasional juga tidak kalah penting yakni sebagai forum negosiasi dan mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambil keputusan mereka sendiri. Dalam implementasi diplomasi ekonomi, pemerintah berupaya mendamaikan situasi ketegangan antara politik dan ekonomi; tekanan internasional dan domestik; serta ketegangan antara pemerintah dengan kekuatan lain.

Terdapat beberapa faktor yang membentuk diplomasi ekonomi yang berasal dari sistem internasional. Pertama adalah kekuatan ekonomi relatif yang

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, 60.

Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, "What is Economic Diplomacy," dalam *The New Economic Diplomacy* 4, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, Routledge: Toronto (2011): Hlm. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, 10.

menunjukkan bahwa kekuasaan adalah faktor penentu penting terhadap hasil negosiasi perekonomian yang sebagaimana dipercayai oleh realis. Kedua, adanya organisasi dan rezim internasional yang membantu negara-negara untuk mencapai solusi ekonomi yang kooperatif dan bukan koersif. Terakhir, peranan pasar global sebagai bagian integral dari diplomasi juga turut terlibat dalam proses negosiasi di dalam diplomasi ekonomi.

Sementara faktor domestik yang berkontribusi dalam struktur negara di antaranya adalah interest dan bargaining, serta institusi dan the two-level games. Adanya perbedaan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat akan menentukan sikap nasional terhadap permasalahan ekonomi sehingga pemerintah pada akhirnya perlu saling tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai agen, tetapi juga merekonsiliasi tekanan internal yang saling bertentangan dan memiliki institusi. Menurut Robert D. Putnam, interaksi antara proses domestik dengan negosiasi internasional digambarkan melalui metafora the two-level games, yang mana terdiri dari dua tingkat yang saling berkait. Pada tingkat pertama, yakni pengambilan keputusan domestik yang melibatkan negosiasi antara pemerintah, pejabat, atau kelompok kepentingan untuk saling kompatibel agar kesepakatan internasional dapat dicapai. Pada tingkat kedua adalah negosiasi internasional di mana negara-negara berusaha mencapai kesepakatan di tingkat internasional, di mana semua pihak harus mempertimbangkakn kepentingan dan posisi domestik mereka terlebih dahulu.<sup>27</sup> Unsur-unsur lainnya dalam struktur ideasional juga melibatkan persuasi negosiator

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*, 79.

yang memiliki keyakinannya sendiri berdasarkan berbagai gagasan atau pandangan dunia yang berbeda. Dengan demikian, proses negosiasi tidak hanya tunduk pada sistem, kemasyarakatan, dan tekanan kelembagaan, tetapi juga memerlukan persuasi dan proses tawar-menawar.<sup>28</sup>

#### Paradigma Eklektik

Paradigma Eklektik yang dicetus oleh J. H Dunning telah menjadi model teoretis utama yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan aktivitas multinasional dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinyesasi di luar negeri (FDI). Paradigma ini meliputi kerangka OLI, yang terdiri dari keuntungan kepemilikan (ownership), lokasi, dan internalisasi. Keuntungan kepemilikan (ownership) berkaitan erat dengan keunggulan kompetitif, di mana perusahaan tertarik terlibat dalam FDI akan cenderung memperhatikan produk atau layanan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Sementara itu, keuntungan lokasi merujuk pada negara-negara alternatif yang melakukan kegiatan penambahan nilai dari perusahaan multinasional. Semakin banyak sumber daya yang tidak dapat dipindahkan, alamiah, atau diciptakan, semakin banyak perusahaan yang memilih untuk memanfaatkan keunggulan tersebut dengan berinvestasi di luar negeri. Keuntungan internalisasi, di sisi lain, mempertimbangkan untuk memberikan FDI atas dasar bahwa perusahaan akan lebih menguntungkan apabila memiliki entitas eskternal

<sup>28</sup> *Ibid*, 6.

yang melakukan pekerjaan atau memproduksi barang di negara asing karena lebih murah dan memiliki pemahaman pasar lokal yang lebih baik.<sup>29</sup>

#### Konsep Ketahanan/Keamanan Energi (Energy Security)

Kepentingan dalam ketahanan energi didasarkan pada anggapan bahwa suatu pasokan energi yang tidak terputus berperan penting untuk berfungsinya suatu ekonomi. Terdapat empat elemen utama yang berperan dalam ketahanan energi. Pertama, elemen yang paling dominan adalah ketersediaan energi untuk perekonomian yang memerlukan keberadaan fisik. Seringkali, dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti sumber daya fosil pada dasarnya sangat terbatas. Kedua, unsur aksesibilitas sumber daya alam yang dibutuhkan bagi konsumsi dan produksi sumber daya. Akses terhadap sumber daya energi seringkali membawa implikasi geopolitik. Ketiga, elemen biaya sumber daya energi tersebut. Unsur keempat adalah unsur kelestarian lingkungan yang melibatkan pembangunan berkelanjutan.<sup>30</sup>

Energi bermain penting dalam kesejahteraan dan menjamin keamanan nasional. Keamanan energi dapat menjamin kemampuan negara untuk mengakses sumber daya energi yang diperlukan untuk kelanjutan pembangunan ketenagalistrikan nasional dan infrastruktur yang memadai untuk disalurkan ke

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Claudia Beatriz Batschauer da Cruz, Dinora Eliete Floriani, dan Mohamed Amal, "The Electic Paradigm as a Comprehensive Model to Analyze Subnational Determinants of FDI," *International Journal of Emerging Markets*, (2020), https://www.researchgate.net/publication/329151644\_The\_Eclectic\_Paradigm\_as\_a\_Comprehensive Model to Analyze Subnational Determinants of FDI.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bert Kruyt, D.P. van Vuuren, H.J.M. de Vries, dan H. Groenenberg, "Energy Policy: Indicators for energy security," *Elsevier* 37, (2009): 2167, https://relooney.com/NS4053-Energy/0-Energy-Security\_31.pdf.

pasar. Namun, konsep ketahanan energi dapat diinterpretasikan secara berbeda, tergantung pada peranan aktor. Bagi negara importir, ketahanan energi dianggap sebagai keamanan pasokan, di mana kekonsistenan akses terhadap sumber daya energi yang terjangkau menjadi hal terpenting. Sementara bagi negara eksportir, keamanan permintaan energi (*security of demand*) membutuhkan akses pasar ke negara maju dan andal untuk dapat menjual produk energi dalam jangka waktu yang panjang. Bagi negara importir maupun eksportir produk energi, ketahanan energi dapat dengan cepat dirusak dan dipengaruhi oleh guncangan harga, pengurangan, atau penghentian pasokan energi yang tidak terduga.<sup>31</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi negara-negara ketika energi menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Masing-masing negara importir dan eksportir memiliki pertimbangan ekonomi tentang menjaga pasokan dan permintaan energi. Oleh karena itu, kedua negara importir maupun eksportir berusaha meminimalisir terjadinya gangguan atau kekurangan energi agar tidak mengancam kesejahteraan ekonominya. Selain itu, negara memiliki kekhawatiran politik terhadap potensi pengaruh dari negara-negara eksportir atas negara-negara importir dan negara-negara transit (negara yang berfungsi sebagai jalur transportasi yang dilalui sumber daya energi saat diangkut dari negara produsen ke negara konsumen). Kekhawatiran ini disebabkan oleh para pemasok energi yang memiliki posisi dominan dalam industri energi global. Dalam situasi seperti ini, negara-negara eksportir energi memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Amelia Hadfield, "Energy and Foreign Policy: EU-Russia Energy Dynamics," dalam *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*, ed Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne (Oxford: Oxford University Press, 2016), 455.

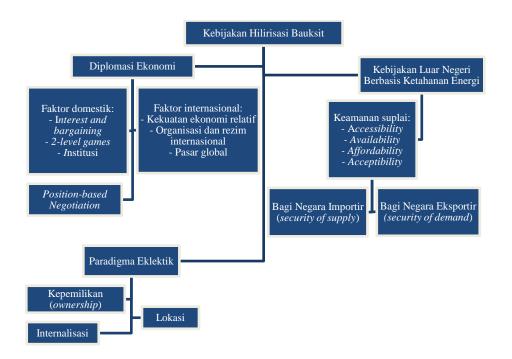
mereka sebagai pengekspor untuk mempengaruhi negara importir dan negara transit, baik secara politik maupun ekonomi. Dalam fenomena ini, negara transit mungkin juga memiliki peranan penting dalam perdagangan energi dan dapat memperoleh keuntungan melalui biaya transit dan keuntungan ekonomi lainnya. Dengan demikian, faktor ekonomi dan politik berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri ketahanan energi, di mana negara-negara menggunakan instrumen kebijakan ekonomi untuk mencapai kepentingan politik dan ekonominya.<sup>32</sup>

Sebagaimana sumber daya alam bagian penting dari kekuatan negara, energi dapat digunakan sebagai alat dalam kebijakan luar negeri. Christopher Hill menyatakan bahwa alat kebijakan luar negeri suatu negara bergantung pada sumber daya, kapabilitas, kekuatan, dan pengaruh suatu negara, dan dapat diurutkan berdasarkan spektrum kekuatan-kekuatan tersebut. Energi dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu kepentingan negara melalui berbagai cara, mulai dari pemaksaan dalam bentuk fisik, diplomasi, maupun budaya politik.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Hadfield, "Energy and Foreign Policy: EU-Russia Energy Dynamics," 455.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid*, 456.

Grafik 1.6.1: Kerangka Pemikiran Kebijakan Hilirisasi Bauksit yang Dipengaruhi oleh Diplomasi Ekonomi, Kebijakan Luar Negeri Berbasis Keamanan Energi, dan Paradigma Eklektik



Kebijakan hilirisasi industri melibatkan diplomasi ekonomi yang kuat untuk pembangunan smelter guna mengolah dan menciptakan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Secara domestik, diplomasi ekonomi menunjukkan tekad negara eksportir untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan diversifikasi ekonomi. Pertimbangan yang muncul dari faktor domestik dipengaruhi oleh *interest and bargaining*, peran institusi, dan fenomena 2-levelgame. Di sisi internasional, diplomasi ekonomi dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi relatif, peran organisasi dan rezim internasional, dan pasar global. Selain itu, implementasi kebijakan hilirisasi juga dipengaruhi atas pertimbangan kebijakan luar negeri berbasis ketahanan energi, baik dari negara eksportir maupun importir.

Negara eksportir fokus pada *security of demand* yang memastikan permintaan yang konsisten untuk produk hilirisasi. Sementara negara importir memprioritaskan ketahanan pasokannya dengan memastikan pasokan mineral yang stabil dan terjamin.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penulisan penelitian ini dibagi atas lima bab, Pembahasan yang terkandung dalam saru dengan bab lainnya memiliki hubungan satu sama lain sehingga pada akhirnya akan membentuk tulisan karya yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penelitian terlampir seperti berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori dan Pemikiran, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II INDUSTRI BAUKSIT INDONESIA DAN HILIRISASI 2023

Pada bab ini penulis akan membahas potensi bauksit Indonesia, hukum dan undang-undang yang mengatur sumber daya bauksit Indonesia, faktor-faktor penyebab Indonesia menghentikan ekspor bauksit mentah ke dunia, dan kepentingan Indonesia terhadap bauksit, di mana peneliti juga membahas bagaimana pemerintah bernegosiasi dengan perusahaan bauksit yang terlibat, bernegosiasi dengan masyarakat lokal di wilayah Indonesia yang memiliki potensi kandungan bauksit yang kaya, seperti di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.

#### BAB III ARTI PENTING BAUKSIT BAGI TIONGKOK

Pada bab ini penulis akan membahas dinamika hubungan ekonomi Tiongkok-Indonesia, kerja sama energi dan mineral, ketergantungan Tiongkok terhadap bauksit, serta tujuan dan motivasi Tiongkok berinvestasi smelter pengolahan bauksit.

### BAB IV NEGOSIASI INDONESIA-TIONGKOK UNTUK INVESTASI SMELTER PENGOLAHAN BAUKSIT (2019-2024)

Pada bab ini penulis akan memaparkan cara Indonesia melobi dan bernegosiasi dengan Tiongkok terkait investasi smelter untuk menerapkan kebijakan hilirisasi bauksit di Indonesia.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup/kesimpulan dan saran.